

KARTINISCHOOL: PENDIDIKAN KAUM PRIBUMI JAWA DI SEMARANG TAHUN 1911-1920

AINUL INAYATULLAH
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : ainul.inayah@gmail.com

Dr. Wisnu.M.Hum
S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kartinischool merupakan sekolah pertama wanita pribumi Jawa yang diadaptasikan oleh pemikiran Kartini. Sekolah ini didirikan oleh kaum Humanisme Belanda bernama Van Deventer tetapi dengan mengatasnamakan Kartini. Upaya yang dilakukan oleh Van Deventer, salah satunya dengan propaganda keliling negeri Belanda hingga ke seluruh pelosok eropa. Hasil penggalangan dana dari propaganda keliling tersebut, dapat mendirikan sekolah yang terletak di Karreweg, Semarang. Sebelumnya sekolah ini masih sementara terletak di Jomblang kemudian pindah lokasi area pembangunan di Karreweg, Semarang karena selesai tahapan pembangunan tahun 1915. Para murid perempuan lulusan *Kartinischool* memperoleh pendidikan yang setara dengan kelas eropa terbukti adanya penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa kegiatan sehari-hari. Tahun 1919. Kemudian tahun 1920, para kaum Humanisme Belanda menghentikan penggalangan dana karena Van Deventer telah tiada dan didirikan pembangunan sekolah Van Deventer untuk menghormati jasa-jasanya. Lulusan sekolah wanita pribumi ini menghasilkan para penggerak-penggerak awal organisasi perempuan yang memperjuangkan hak dalam masalah-masalah kerumahtanggaan.

Pembahasan pada tulisan ini bertujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pendidikan kolonial yang dicanangkan oleh politik etis sehingga mampu merubah pola arah pemikiran masyarakat Jawa yang lebih nasionalisme, sekaligus sebagai alat menggulingkan kekuasaan Belanda akan kolonialisme dan imperialisme. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, antara lain; Heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

Keywords: Sekolah, Wanita, Pribumi, Kartini.

Abstract

Kartinichool is the first school of indigenous Javanese women who is adapted by Kartini thinking. This school was founded by the Dutch Humanism named Van Deventer but on behalf of Kartini. Efforts made by Van Deventer, one with the propaganda around the Netherlands to all corners of Europe. The fundraising result of the mobile propaganda can establish a school located in Karreweg, Semarang. The schools in this place are still standing in Jomblang and then moved to the location of the development area in Karreweg, Semarang because the construction phase was completed in 1915. The female students competed to use schools that use daily classes. In 1919. Then in 1920, Dutch Humanism canceled the fundraising because Van Deventer had built and founded the Van Deventer school to honor his services. This native female school graduate produces the activists of women's organizations who fight for rights in household matters.

The discussion in this paper aims to find out whether there are factors that can be proclaimed by ethical politics, so that it can change the patterns of thought of the Javanese society which are more nationalism, as well as a tool that overthrows the Dutch power of colonialism and imperialism. In this study using historical research methods, among others; Heuristics,

Keyword: School, Women, Native, Kartini.

PENDAHULUAN

Sebutan *Kartinischool*, sebuah sekolah yang mengadaptasikan pemikiran sosok Kartini sebagai wanita keturunan darah biru. Pendirian sekolah ini atas upaya meneruskan wasiat tentang perempuan yang terdidik sekaligus kekaguman kaum humanisme Belanda terhadap sosok kartini dari cara pandang kemampuan memperjuangkan kebebasan wanita pribumi dari belenggu ketidaktahuan. Sudut pandang kaum

humanisme Belanda mengistimewakan Kartini karena pemahaman akan arti seni bawaannya, kecepatan pemahamannya, pembedaannya memperkuat alasan untuk memiliki hak berhubungan dengan Negara asalnya di Insulinde. Hal ini memberikan harapan bagi kaum wanita pribumi Jawa untuk mengubah stigma bahwa wanita harus mengikuti adat *pingitan* tanpa suatu pendidikan formal.

Kesadaran akan kebutuhan seorang wanita memperoleh pendidikan, memberikan jalan bagi

kelompok sosialis Belanda untuk mencoba membuka sekolah-sekolah khusus bagi para wanita pribumi sebagai misi langkah awal pemberdayaan wanita. Akan tetapi, kondisi masyarakat yang terjajah oleh bangsa Belanda sehingga kurang mendapatkan respon yang positif bahkan dianggap tabu jika kaum pribumi berpendidikan setara dengan kaum eropa. Terlebih bagi para wanita kaum pribumi.

Secara praktiknya, peran politik *gradualisme* merupakan proses keberadaan pendidikan bagi anak kaum pribumi mulai dicanangkan walaupun masih terlampau sedikit dan masih didominasi anak kaum eropa. Hal ini bertujuan meminimalisir ancaman dari segala kepentingan yang tidak mendukung kekuasaan pemerintahan Belanda. Sehingga pemerintahan Belanda hanya berinisiatif untuk menyediakan aturan-aturan yang mengikat tanpa merugikan pembendaharaan pemerintah Belanda. Lebih parahnya, Kondisi ini juga mempengaruhi kaum perempuan pribumi karena mengalami depresi akibat harus mengikuti adat patriarki tanpa masa persekolahan. Padahal wanita mempunyai beban tugas untuk mempersiapkan mental dalam mengurus dan mengasuh anak-anaknya kelak.

Tahun 1870, pemerintah Belanda mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan pendidikan cenderung dibiayai oleh pihak swasta. Mulai dari perencanaan konsep pembangunan gedung hingga sistem kurikulum yang mengadopsi sekolah eropa. Kondisi ini berlaku bagi seluruh sekolah di Hindia-Belanda, termasuk sekolah wanita pribumi pertama di Jawa dengan sebutan *Kartinischool*.

Sekolah ini dibangun oleh kaum Humanisme Belanda atas naungan sebuah nama : "*Onder de houde vaan een naam*" Sebelum kaum humanis Belanda mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi, Kartini telah berusaha memulai untuk membuka sebuah kursus yang didirikan dengan maksud para wanita pribumi dapat belajar membaca tentang Al-qur'an sebagai pedoman kitab suci umat islam, selain itu, Ilmu Pendidikan yang dipublikasikan kepada para muridnya, yaitu; pengetahuan tentang menulis dan membaca aksara jawa, keterampilan membuat dan menganyam hingga bernyanyi.

Dalam berbagai berita di media pers, sarana pendidikan dan pengajaran berkontribusi mengenai pemahaman terkait kesadaran wanita akan hak dan kewajibannya sekaligus dapat meningkatkan keterampilan yang lebih. Hal ini bertujuan supaya wanita dapat melahirkan anak-anak yang terdidik dan dapat membantu kaum laki-laki dalam memajukan bangsanya. Sehingga wanita mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki tanpa menghilangkan kodratnya sebagai "ibu". Segala upaya yang dilakukan wanita pribumi jawa dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran tidaklah sia-sia setelah pemerintah Belanda mendengarkan dan menindaklanjuti segala bentuk aspirasinya

Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam menunjang perubahan pola pikir seseorang. Berdasarkan Konsep pendidikan yang diadakan kaum Humanis Belanda merepresentasikan budaya dari Eropa yang syarat akan penurunan buta huruf. Proses kebijakan

pendidikan ini juga menyangkut para penggemar "Kartini" di negeri Belanda yang ingin turut serta bersimpati dengan menyuarakan slogan tentang pemberdayaan kaum perempuan pribumi untuk meneruskan cita-cita Kartini. Adanya Pemberdayaan pendidikan ini secara ideal merupakan proses holistik yang berkelanjutan dengan dimensi kognitif, psikologis, ekonomi dan politik untuk mencapai suatu emansipasi wanita. (Carolyn Medel dan Bettina Bochynek: 1995).

Pendirian sekolah perempuan pribumi telah didukung oleh para anggota organisasi asosiasi yayasan Kartini (*Kartinifounds*) di Den hag tahun 1912. kelahiran Asosiasi *Kartinifounds* Belanda memuat perjuangan panjang bagi kaum Humanis-Liberal Belanda untuk membuktikan tentang respon pemerintah Hindia-Belanda bukan hanya sekedar wacana tetapi tindakan nyata untuk pembangunan sekolah wanita tersebut.

Peran Van Deveter berpengaruh dalam mengsucceskan pendidikan bagi kaum wanita pribumi Jawa. Melihat sistem kerja pemerintahan Hindia-Belanda yang lamban, Van Deventer menggelontorkan biaya secara pribadi dengan menggalang dana. Aksi propaganda keliling di berbagai wilayah negeri belanda membuahkan hasil nyata untuk membentuk yayasan Kartini dan meluaskan sekolah *Kartinischool* di berbagai daerah. Dibentuknya Yayasan Kartini sebagai tempat pengelolaan pengurusan sistem pendidikan *Kartinischool*. Antara lain; ketenagakerjaan guru, kurikulum pendidikan dan pengajaran sikap di lingkungan *kartinischool*.

Keunikan dari sekolah *Kartinischool* dibandingkan dengan sekolah *primary* eropa lainnya, sekolah ini mempunyai sistem pendidikan ala barat tetapi memfokuskan ke arah pembelajaran pemberdayaan wanita sesuai dengan arah pemikiran humanisme, yaitu: *pertama*, pendidikan yang wajib diberikan pada anak perempuan adalah menanamkan perasaan religius dalam kepribadian wanita. *Kedua*, melindungi mereka dari bahaya dunia luar atau kontaminasi. *Ketiga*, menjaga wanita dari sifat kemalasan. (Levi Sheely: 1899).

Pembangunan sekolah *kartinischool* telah menyebar menjadi bercabang-cabang di berbagai daerah Hindia-Belanda. Diantaranya: Batavia, Buitenzorg, Madion, Malang, Pekalongan, dan Chirebon. Pembukaan Setiap cabang sekolah *Kartinischool* di berbagai daerah saling berhubungan satu sama lainnya dan sama halnya mendapatkan songkongan biaya dari yayasan Kartini. Perbedaan dari cabang *Kartinischool* lain, yaitu; kepengurusan ketenagakerjaan guru di sekolah *kartinischool* saja. Kemudian sekolah ini termasuk dalam kategori sekolah *primary* eropa yang lulusan siswinya dapat melanjutkan sekolah tinggi atau *Highest School*. Diantaranya; HIS, M.U.L.O, dan AMS. Sehingga pendidikan ini lebih inklusif bagi anak-anak Hindia-Belanda.

Pada penelitian ini menggunakan dua teori, antara lain; teori Feminisme dan teori Humanisme. Teori feminisme menjelaskan bahwa adanya kesetaraan gender yang memuat termaginalkannya kedudukan seorang wanita akan hak perkawinan dan pewarisan. Sehingga dunia pendidikan sebagai ranah konkrit untuk

mengangkat derajat kaum wanita itu sendiri sekaligus menghapus perempuan yang ter subordinasi dari beragam konstruksi sosial masyarakat. (Alfian Rokhmansyah: 2016). Sedangkan teori humanisme mengaitkan tentang pendidikan yang mendepankan kemampuan kepribadian. Menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap kepribadian seseorang mempunyai perilaku yang bersifat positif untuk mengalami suatu perkembangan dan kekuatan untuk melawan perkembangan itu. Pengaruh rasa takut dalam berusaha, mengambil kesempatan, hingga membahayakan apa yang telah dimilikinya. Tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju dalam menghadapi dunia luar. Sehingga Humanistik memberikan rasa kemanusiaan atau berhubungan dengan masalah kemanusiaan. (Henryk Misiak dan Virgini Staudt Sexton: 2005).

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, memuat beberapa permasalahan, yaitu:

- (1) Bagaimanakah latar belakang kaum humanis Belanda membangun sekolah husus perempuan dengan mengatasnamakan “Kartini” ?
- (2) Bagaimanakah pencapaian sekolah *Kartinischool* di kota Semarang tahun 1911-1920 ?

METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan sejarah dibutuhkan sebuah aturan dan petunjuk teknis dalam penyajian fakta sejarah. Sehingga analisis fakta-fakta tersebut direkonstruksikan berupa sintesa untuk menghasilkan penulisan sejarah yang *saintific*. Adapun proses metode penelitian sejarah menurut Aminudin Kasdi, antara lain ; Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

Proses pertama, **Heuristik** (*Yunani : heureskeinto find, menemukan*), yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan. Pada proses ini, peneliti dapat menggunakan berbagai sarana media sebagai bagian sumber penelitiannya. Sumber-sumber tersebut dapat dikategorikan dengan sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Saat ini sumber tertulis telah berkembang bentuknya. Dapat berupa tulisan manual hingga digital. Khusus untuk penelitian ini, peneliti menggunakan media digital, seperti ; Koran yang telah dimuat dalam bentuk *softcopy*, majalah digital atau biasanya dikenal *magazine digital* dan buku online hingga jurnal. Hal ini tentu bersesuaian dengan topik yang membahas tentang peristiwa pada zamannya yang menerbitkan kembali pada era saat ini. Tetapi tidak meninggalkan unsur substansi materi yang akan menjadi bahan dalam penelitian tersebut.

Proses kedua, **kritik** (pengujian) terhadap sumber terdiri atas; kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern merupakan pengujian otentisitas, asli, turunan, palsu, serta relevan dalam suatu sumber. Sedangkan, Kritik Intern, yaitu pengujian terhadap substansi isi atau kandungan sumber dengan bertujuan menyeleksi data menjadi fakta. Sehingga peneliti membutuhkan proses wawancara dan menyesuaikan satu sumber dengan sumber lainnya.

Proses ketiga, **Interpretasi** atau penafsiran. Peneliti melakukan penafsiran dari berbagai sumber-

sumber yang telah terkumpul sedemikian rupa sehingga sumber dapat menjadi serangkaian penulisan cerita sejarah. Penafsiran tersebut bertujuan mengaitkan antara fakta dengan kemampuan pengetahuan peneliti yang disertai dengan ilmu-ilmu sosial yang mendukung. Sehingga dapat meminimalisir penulisan sejarah yang bersifat subjektif atau hanya bersifat berat sebelah pribadi (*personal bias*).

Proses keempat, **Historiografi** merupakan tahap penulisan (*grapein-tulisan*) sejarah. Pada tahap ini serangkaian fakta mengulas berbagai latarbelakang suatu fenomena sehingga dapat menuliskannya dalam bentuk cerita sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

• Latar Belakang Pendidikan di Hindia-Belanda

Pada abad ke-16, penerapan pendidikan telah muncul ke permukaan masyarakat Jawa dengan memperkenalkan model pembelajaran yang modern. Pendidikan ini berfungsi untuk mencerdaskan golongan kelas eropa yang menetap di Hindia-Belanda. Pendirian sekolah-sekolah ini juga mengizinkan bagi penduduk pribumi yang ingin merasakan belajar sesuai dengan pakem eropa tetapi pendidikan ini ternyata masih sangat sulit diterima oleh kalangan masyarakat pribumi karena kepercayaan tentang agama islam dan tokoh-tokoh *kyai* yang mempengaruhi masyarakat Jawa untuk memilih pendidikan informal.

Salah satu adanya pendidikan informal yang berkembang di Hindia-Belanda, yaitu pesantren. Pesantren merupakan suatu pendidikan yang mengajarkan segala pengetahuan akhlak dan nilai-nilai moral. Pesantren juga memiliki hubungan fungsional dengan masyarakat dan hubungan tata nilai kultur masyarakat Jawa. Melalui sudut pandang kepentingan pemerintahan Belanda, keberadaan pendidikan pesantren dianggap sangat buruk jika ditinjau dari segi tujuan, metode dan bahasa (bahasa Arab) yang digunakan untuk mengajar. Akibatnya, sangat sulit untuk diterapkan dalam perencanaan pendidikan umum. Selain itu, tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi. Hal ini dapat terlihat dari metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya terkait antara peran seorang guru atau pemuka agama.

Sebaliknya, pendidikan model *Zending* menyebar hingga ke pelosok Hindia-Belanda karena secara filosofis dan teknik mampu menyerap kebiasaan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga orientasi terkait sekolah umum mengarahkan tentang kecerdasan dan keterampilan secara keduniawian. Selain itu, pendidikan pesantren hanya akan memberikan rasa ketakutan tersendiri bagi kolonial Belanda terhadap perkembangan islam. Mayoritas sekolah-sekolah yang didirikan oleh VOC, pengajaran tentang materi keagamaan masih sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kecuali sekolah yang dirintis oleh kaum missionaris untuk menyebarkan agama kristiani. Hal ini mengingat bahwa penduduk pribumi telah mempelajari al-Qur'an dan kepercayaan

dari syariat agama islam melalui sekolah-sekolah bernuansa agama islam. Seperti; langgar, surau atau pesantren.

JAVA AND MADURA					
Government School		Private School		Total Number Of Boys Attending School	Total Number Of Girls Attending School
1st Class	2st Class	Non-Religi	Religi		
83	749	340	161	377.325	30.098
Outer Possesion					
Government School		Private School		Total Number Of Boys Attending School	Total Number Of Girls Attending School
1st Class	2st Class	Non-Religi	Religi		
12	417	371	1.677	175.843	40.933
JAVA AND MADURA					
Government School		Private School		Total Number Of Boys Attending School	Total Number Of Girls Attending School
1st Class	2st Class	Non-Religi	Religi		
83	749	340	161	377.325	30.098
Outer Possesion					
Government School		Private School		Total Number Of Boys Attending School	Total Number Of Girls Attending School
1st Class	2st Class	Non-Religi	Religi		
12	417	371	1.677	175.843	40.933

Pada masa pemerintahan VOC, Pemahaman tentang sekolah model *Zending* merupakan sekolah yang berasal dari penguasa gereja dan guru-gurunya pun diangkat oleh gereja. Penggunaan bahasa portugis dan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar sehari-hari dalam menjalankan aktifitas pembelajaran. Sehingga tak jarang kaum pribumi kesulitan akan materi tersebut. Setelah adanya kemunduran VOC, kebijakan pendidikan dan pengajaran beralih sesuai dengan penerapan sistem pemerintahan kekuasaan kerajaan Belanda.

Pada tahun 1870 dapat dikatakan sebagai awal masa liberalisme, ketika pemerintah Belanda memberikan kewenangan untuk para pengusaha dan pemodal swasta Belanda menanamkan investasi seluas-luasnya dan dapat mengatur ketenagaan kerja di Hindia-Belanda. Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang agraria (*Agrarische Wet*) 1870. Hal ini berfungsi

supaya pemerintah Hindia-Belanda tidak campur tangan akan beban ekonomi masyarakat pribumi yang menghambat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat pribumi.

• **Kebijakan Politik Etis Terhadap Pendidikan Kaum Pribumi**

Pada tahun 1872, perubahan pola pikir untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan dilakukan secara holistik tanpa memandang kelas, ras dan status sosial agar dapat menyukkseskan pendidikan umum bagi seluruh penduduk pribumi. Namun, kurikulum yang diberikan terlampau berat karena karakter dan sistem pendidikan terlalu maju. Akibatnya kondisi ini menyentuh pemerintah untuk merubah sistem pendidikan dan pengajaran sesuai dengan arahan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam redaktur majalah berbahasa belanda yang terkemuka di Hindia-Belanda dengan berjudul *The Locomotive*, Brooschooft mempublikasikan tentang penggambaran masyarakat jawa yang tertindas oleh para pengusaha swasta eropa. Awalnya kaum pribumi mempunyai usaha-usaha menengah untuk menopang kelangsungan hidupnya. Tetapi ternyata usaha-usaha menengah kaum pribumi berupa industri tekstil mengalami kebangkrutan karena produk-produknya telah kalah bersaing di pasaran eropa. Kemudian berita ini telah dicatatkan kembali dalam tulisan karya-karya Snouck Hurgronje tentang ini mendapatkan perhatian secara intensif karena dapat memberikan informasi fakual terkait perkembangan daerah jajahan untuk ditemukan akar solusi penyelesaiannya.

Kebijakan *politik etis* tertuang dalam karya tulisan Van Deventer dan telah dimuat dalam majalah *De Gids* tahun 1899 yang berjudul “Een Eereschuld (Dept of Honour) artinya Hutang Budi. Tulisan ini menjelaskan tentang program Trias Politica Deventer antara lain; Pertama, program irigasi atau pengairan, yaitu proses perbaikan pengairan dengan membangun bendungan untuk kebutuhan pertanian. Kedua, program emigrasi yang bertujuan mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi. Ketiga, memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Sehingga gagasan ini menjadikan Van Deventer dijuluki sebagai “Bapak Politik Etis”. Dengan demikian, prinsip-prinsip kesuksesan program Trias Politica Van Deventer melalui kebijakan politik etis ini memberikan ruang gerak untuk memperoleh kemakmuran bagi penduduk Hindia-Belanda. Makna Politik etis ini sebagai sandaran pemikiran akan beban moral dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah Belanda sebagai pengakuan akan dirinya menjadi bangsa kulit putih yang lebih bermartabat dari pandang bangsa jajahannya untuk sanggup mensejahterakan orang-orang pribumi.

Pemikiran ini tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa dari semboyan bangsa barat yang menjelaskan bahwa keberadaan bangsa timur belum maju dan tetap dalam kehidupan yang primitif apabila tanpa adanya sentuhan dari bangsa barat. Maka atas dasar pemikiran ini, kaum Belanda menyebutnya dengan istilah *The White Man’s Burden*. Wujud pemikiran ini berupa

pembangunan sekolah, rumah sakit dan menyebarkan agama kristiani. Namun, dalam implementasi kebijakan pemerintah Hindia-Belanda masih belum seluruhnya tercapai karena terbelenggu akan adanya kepentingan-kepentingan golongan kaum Belanda tertentu. Walaupun sebagian orang barat belum terlepas akan kepuasan praktik monopoli, setidaknya bangsa barat telah membayar hutang hanya sedikit jika dibandingkan apa yang telah diperoleh bagi negeri Belanda melalui misi penjajahan eropa.

Kaum humanis Belanda mendirikan sekolah-sekolah eropa sesuai kebutuhan kaum pribumi. Salah satunya sekolah-sekolah dasar eropa, yaitu; sekolah khusus anak perempuan. Mengenai kurikulum, setiap sekolah-sekolah jawa mempunyai kesamaan yang dilakukan dengan serentak. Artinya baik sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama mendapatkan keilmuan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang telah disesuaikan dengan pakem asli di negeri Belanda.

Hal ini dapat terlihat dari kesederhanaan materi pembelajaran. Diantaranya; menulis, membaca, menyanyi, menari menggambar dan menggunakan bahasa belanda sebagai bahasa pengantarnya. Unikny khusus materi bahasa masih memegang bahasa lokal, yaitu bahasa jawa dan sunda. Tetapi terkait belajar berhitung sekiranya masih sangat sederhana karena adanya kesulitan bagi siswa untuk memahami perhitungan logaritma yang rumit.

- **Cikal Bakal Kartinischool Jawa**

Karya buku J.H. Abendanon, mengundang rasa empati masyarakat di negeri Belanda dan kekaguman mereka terhadap tokoh Kartini yang berani melawan *dualisme* pendidikan dengan mencatatkan diri sebagai penyumbang. Kemudian, masyarakat Hindia-Belanda mengusung perkumpulan komite dengan nama *yayasan Kartini* sebagai pengelola penggalangan dana untuk sekolah *kartinischool*. Setelah memahami substansi buku itu, seorang pembaca tersentak batinnya untuk membantu keadaan masyarakat pribumi jawa. Yaitu; Conrad Theodore Van Deventer.

Berkat tokoh-tokoh pemikiran Humanisme Belanda, tuan Conrad Theodore Van Deventer dan nyonya Van Deventer ((Hilda Bossevain's) serentak melakukan propaganda keliling dengan menjual buku *Door Duisternis Tol Lich* hingga ke berbagai pelosok negeri Belanda dan Amerika Serikat. Keberhasilan penjualan buku itu dapat menghasilkan pendapatan yang fantastis dan keuntungan modal yang tinggi untuk membantu pembangunan sekolah kelas *primary* belanda dengan pemberian nama yang mengatasnamakan "Kartini", atau disebut *Kartinischool* semarang.

Dalam laporan asosiasi yayasan *Kartinifound* menyebutkan bahwa yayasan ini telah mengantongi donasi sebesar f 23 untuk pembangunan sekolah *Kartinischool* semarang dan berhasil meresmikan sekolah perempuan pribumi jawa dengan wakil ketua residen semarang dan penduduk setempat. Hal ini menunjukkan banyak peminat untuk menyekolahkan anak-anak perempuannya di sekolah *Kartinischool* semarang.

Aliran dana yang terkumpul sangat tinggi sesuai dengan kondisi perekonomian Hindia-Belanda sepanjang tahun 1900-1940. Pengaruh pendapatan meningkat tajam karena barang dagangan import ke luar negeri sangat menguntungkan. Pada tahun 1900 hingga 1913, pendapatan per kapita seluruhnya naik sebesar 2 % dalam setahun masa pemerintahan Belanda. Akan tetapi, pada tahun 1919 mulai terjadinya penurunan yang berkala akibat pengeluaran pemerintah atas biaya operasional kebijakan "politik etika". kemungkinan besar penutupan donasi sekolah Kartini terdapat kesinambungan dengan pergolakan perekonomian yang fluktuatif. Walaupun demikian, penyelesaian dari permasalahan tuntutan pendidikan bagi kaum wanita pribumi berakhir dengan penyediaan sekolah keguruan untuk memberdayakan wanita demi menyelesaikan konflik yang bersifat diskriminasi sosial.

- **Sudut Pandang Kaum Humanis Belanda Tentang "Etis" dan "Wanita"**

Mr.Pieter Brooshoofit merupakan salah seorang tokoh yang sebenarnya berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai notaris dan ibunya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ibunya, Jozine Van der Houven mewariskan sikap keagamaan yang optimis dan kesadaran sosialnya yang aktif kepada Mr.Brooshoofit. sikap itulah sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupannya dengan mengadakan perkumpulan kecil tentang ranah kerohanian, pembinaan moral dan sosial.

Dalam argumentasinya terdapat beberapa alasan terkait keterlibatannya dalam bidang politik dan ekonomi, yaitu; pertama, kondisi politik Hindia seharusnya dipisahkan antara kekuasaan legislatif atas Hindia dengan kekuasaan legislatif atas Belanda, Gubernur Jendral memegang kekuasaan eksekutif dan Dewan Hindia yang diangkat mempunyai kekuasaan legislatif untuk menangani permasalahan daerah jajahan dengan dibawah persetujuan pemerintahan tertinggi. Kemudian khusus di negeri Belanda, pembentukan Dewan Kolonial yang diutus oleh Raja mempunyai kewenangan di kursi legislatif, dan Parlemen hanya diberikan wewenang untuk mengawasi secara formal. Kedua, menerapkan desentralisasi seperti; pembentukan dewan daerah dan dewan kotapraja yang jumlah anggotanya terdiri atas setengah bukan pegawai negeri, sisanya sebanyak sepertiga adalah kaum Bumiputera yang terpelajar. Hal ini berfungsi mempermudah pemisahan keuangan dan pinjaman keuangan untuk proyek pembangunan.

Gagasan-gagasan Brooshoofit terinspirasi oleh lingkungan dan dorongan akan kemauannya untuk mewujudkan pelaksanaan "Hindia bagi Hindia" di bidang politik dan ekonomi.¹ Memberantas struktur paternalisme, perwalian dan tekanan terhadap pertahanan kekuasaan bukan berarti tanpa adanya kontroversi atas

¹ D.J.M. Kleymans, *Het Trojaanse Paard : Voorgeschiedenis Der Gementelijke En Gewestelijke Raden In Nederlands-Indie*, (Utrecht: Het Economisch Beleid Creutzberg, 1897).

upaya yang dianggap “etis” tersebut. Diantara golongan kanan dan golongan kiri saling mempertahankan prinsip tentang penilaiannya terhadap politik etis.

Pandangan golongan kanan menganggap bahwa politik etis hanya ungkapan rasa cinta yang berlebihan kepada masyarakat Jawa. Sedangkan golongan kiri juga tidak setuju tentang kebijakan itu karena sifat paternalistis yang sangat kuat dan jarak yang jauh dengan kaum pribumi Jawa.² Alhasil, pandangan penilaian dari setiap golongan menimbulkan sebuah pedoman dasar yang masing-masing golongan mempunyai sudut pandang dalam merealisasikan aspek bidang politik, ekonomi dan pendidikan. Kontradiksi internal ini mempengaruhi citra terkait politik yang “etis” tersebut.

• **Belakang Yayasan Kartini**

Menjelang akhir tahun 1911, sebuah komite terbentuk atas inisiatif Van Deventer dan istrinya Nyonya Hilda de Booy-Boissevain membuka sebuah yayasan di negeri Belanda dengan sebutan nama *Kartini*.³ Berikut nama-nama anggota pembentukan panitia ini diantaranya;

NAMA PENGURUS YAYASAN KARTINI
Nyonya A. Barronase Van Hogendorp-'s Jacob
Mr. J. H. Abendanon
Mr. Van Deventer
Nyonya N. Rooseboom – Pit
Nyonya Kessler - de lange
Jonkur. D. Van Schmitt Auf Altenstadt
Nona J. D. F. de graeff
Nona E. Van Loon
Mr. H. V. Baroon Bentinck
Mr. De. Hannema

Sumber: *Jubileum-Verslag Uit gegeven Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan der Kartini te 's-gravenhage*, (Gravenhage; 1939), hlm. 6.

Pertemuan panitia ini telah berlangsung di diligantia kota s - Gravenhage pada 1 Februari 1912. Selama proses observasi, mulai dilakukan pembentukan secara intensif dengan merangkul seluruh elemen-elemen masyarakat sekitar kota Semarang untuk bekerja sama membangun sekolah khusus perempuan kaum pribumi maka perlu penyelenggaraan kepanitian kepengurusan di Hindia-Belanda yang bertujuan untuk mampu meningkatkan sinergi dalam memperjuangkan cita-cita Kartini tentang kredibilitas kaum wanita berdasarkan kemampuan yang disesuaikan dengan kodrat kaum wanita itu sendiri. Maka beberapa anggota panitia kepengurusan ada yang berasal dari keturunan *ningrat* sebagai bukti pengesahan dan persetujuan didirikannya sekolah yang mulia ini. Beberapa daftar kepengurusan panitia di Hindia-Belanda, yaitu;

NO	Laporan Pengurus Kartinischool Semarang 1915	Peran
1	F.P.K. KERN, Residen Semarnng	Wakil Ketua
2	Raden Mas Adipati POERBOHADININGRAT, Bupati Semarang	Sekretaris
3	Mr.A, M JOKES	Sekretaris
4	J.C.BIJLEVED, Pejabat Javasche Bank	Bendaharawan
5	Ny. C. HARTMAN-ENGELBRECHT	Anggota
6	R. A. SCHOONHOVEN	Anggota
7	Mas MANGOENKOESOEMO	Anggota

NO	Tenaga Pengajar Kartinischool Semarang Tahun 1915	Peran
1	Nona F.A. SCHIPPERS	Kepala Sekolah
2	Nona S. BAUSCH	Guru
3	Nona A.S.M. de BOER	Guru
4	Nona J.A.M. TAENAY	Guru

Sumber : Bambang Eryudhawan, 100 Tahun Bangunan SD Kartini Semarang 1915-2015,(Jakarta; Yayasan Arsari Djojohadikusumo, 2015), hlm. 13.

Pembentukan kepanitian ini memberikan kebebasan dan sangat bermanfaat daripada hanya bergantung kepada panitia perkumpulan atas nama Belanda. Maka secara implementasinya perlu mendatangkan orang-orang Belanda dan kaum pejabat pribumi untuk turut ikut membantu mencapai ketersediaan yang bukan hanya sekedar dana tetapi juga berkontribusi sebagai anggota panitia penyelenggaraan konsep pendidikan sekolah atas nama Kartini tersebut. Kemudian para personel Eropa yang telah mendapatkan amanah sebagai Anggota tenaga pengajar di sekolah itu diantaranya; Kepala Sekolah dan para Guru Belanda yang mengemban tugas berat untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak perempuan pribumi yang sama sekali belum pernah menyentuh pendidikan berkelas Eropa apalagi bersentuhan langsung dengan pengajar Eropa akan terang-terangan menstranferkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna sampai akhir hayat bahkan hingga ke anak-anak cucunya nanti.

Pasalnya, latarbelakang para guru yang didatangkan langsung dari negeri Belanda dapat.

² Robert, Fruin, *Nederland's Rechten en Verplichtingen Ten Opzichte Van Indie: Verspreide Geschriften*, jilid. 10, ('s-Gravenhage; Ons Program, 1905).

³ De Indisch Courant, 16-12-1925

memberikan pengalaman tersendiri bagi setiap personil pengajar di negeri kaum terjajah. Tentu hal ini memberikan stimulasi dalam menyajikan arena dunia pendidikan yang terbaru bagi pengajar eropa sekaligus bagi para murid perempuan pribumi. Promosi pendirian dan pemeliharaan sekolah ini adalah milik penduduk asli. Sedangkan tentang penetapan bahwa sekolah yang didirikan atau didukung oleh serikat pekerja hanya menegaskan akan bagaimana untuk dapat menghormati perasaan religius para murid-muridnya. Pengakuan setiap murid yang berbeda-beda menjadi bagian proses yang merupakan salah satu indikator pengetahuan dan sikap religi yang terjadi tanpa perbedaan afiliasi keagamaan apapun. Walaupun kebudayaan modern eropa menguasai pemikiran wanita jawa masih mendukung keberadaannya selama adanya kesesuaian etika orang jawa. Sehingga proses kebudayaan ini mengalami suatu akulturasi budaya di Indonesia.

- **Pembukaan Sekolah Perempuan Pribumi Jawa di Semarang**

Tepat pada hari Senin, 15 September 1913, di kaki bukit candi daerah Jomblang, terdapat sebanyak 70 murid dan guru-guru Belanda berkumpul merayakan hari pembukaan perdana sekolah Kartini untuk perempuan-perempuan pribumi jawa. Acara ini mengusung tema peresmian pembukaan sekolah mengenang sosok sahabat wanita yang begitu dekat dengan kehadiran Van Deventer dan J.H.Abandanon yang tak lain adalah Kartini. Bersama dua tokoh Boedi Oetomo yaitu Raden Kamil dan Mas Aboekasson Atmodirono sebagai inspektur sekolah bumiputera dan arsitek, mengucapkan rasa terima kasih karena telah mengupayakan pengumpulan dana untuk pendirian pembangunan sekolah Kartini di Karreweg (sekarang menjadi jalan Dr.Cipto). Kehadiran R.M.A.A. Poerboadiningrat sebagai bupati semarang, menjadi saksi bisu pengguntingan pita yang menandakan dibukanya sekolah dasar atau *Primary* perempuan pertama pribumi yang dinamakan *Kartinischool*.

Pada tahun 1915, pembukaan sekolah Kartini telah resmi menggunakan bangunan karya Insinyur-Arsitek Tuan Maclaine Pont. Ornamen gaya klasik mendominasi struktur bangunan dengan aksen kayu pada kerangka fondasi tiang utama menegaskan bangunan sekolah tampak lebih sederhana dan hidup. Menelusuri suasana mengubah atmosfer yang berbeda setelah meninggalkan rumah sewanya di jomblang. Sehingga para guru dan murid perempuan melakukan aktifitas belajar mengajar tanpa perlu khawatir mengenai fasilitas yang kurang layak.

Pada awal tahun pelajaran, jumlah murid perempuan telah mencapai sebanyak 112 siswa yang telah dibagi dua kelas paralel. Yaitu; kelas I dan II. Khusus kelas I merupakan kelas dasar yang masih menerapkan bidang keilmuan dasar bagi murid baru dan mempersiapkan pengembangan kemampuan untuk memenuhi persyaratan naik ke kelas II. Proses belajar mengajar ini bersifat fleksibel. Jadi, para murid dapat bermain sambil belajar dengan bantuan bimbingan guru yang profesional.

Sekolah telah berupaya untuk menjalin hubungan dan ikatan kerja sama yang baik sehingga dapat tercapainya sinergi positif bagi perkembangan para muridnya. Maka dari itu regenerasi pendidikan pribumi di Hindia-Belanda telah bertransformasi menjadi pendidikan Belanda. Berikut data jumlah murid perempuan *Kartinischool* di Semarang, yaitu ;

Tahun	Jumlah Siswa								Mene- rima Ijazah
	Kelas								
	1	2	3	4	5	6	7	Total	
1913	87	25						112	
1914	32	56	25					113	
1915	32	30	52	24				138	
1916	31	29	33	44	21			158	
1917	29	29	29	30	32	17		166	
1918	35	22	26	27	22	22	14	168	
1919	31	30	22	23	23	18	14	161	12
1920	34	28	26	25	16	20	11	160	12

Sumber: *Jubileum-Verslag Uit gegeven Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan der Kartinifonds te 's-gravenhage, (Gravenhage; 1939), hlm. 14.*

Pada tahun 1913, para murid baru pada angkatan pertama memulai pelajaran belanda dengan terbagi dua kelas. Di kelas I jumlah siswa lebih banyak dibandingkan kelas II yang hanya berjumlah 25 murid perempuan. Pada kelas I yang dapat lulus ke jenjang kelas tidak sampai melebihi setengah bangku. Penurunan jumlah murid disebabkan oleh banyaknya murid yang tidak mampu melanjutkan sekolah sehingga jumlah murid yang masih tersisa untuk dapat melanjutkan ke tingkat jenjang berikutnya merupakan keberuntungan yang luar biasa. Meskipun hanya sanggup bertahan pada lulusan kelas II.

Kemudian tahun 1914, mengalami jumlah peningkatan kualitas para muridnya dengan terbukti adanya beberapa murid yang mampu melanjutkan ke tahapan jenjang pendidikan di kelas III. Tentu hal ini menjadi sebuah bagian kesuksesan yang luar biasa bagi guru-guru belanda karena telah mampu membuktikan progress yang baik. Walaupun sebelumnya murid angkatan pertamanya hanya dapat menyelesaikan di bangku kelas II. Tetapi perbandingan jumlah murid masih sama dengan tahun sebelumnya. Dalam data itu masih terlihat kelulusan para murid semakin menurun ketika kenaikan kelas berikutnya.

Keadaan ini tetap sama di tahun 1915 hingga 1917 yang secara konsisten menunjukkan peningkatan taraf jenjang kelas yang lebih tinggi, yaitu; setiap tahun para murid perempuan telah menyelesaikan jenjang kelas yang perlahan-lahan namun pasti mendapatkan pendidikan pengajaran hingga di kelas VI. Persamaan pada tahun-

tahun sebelumnya hanya bermasalah penurunan jumlah murid pada setiap tingkatan kelas.

Selanjutnya, tahun 1918 dan 1919 penentuan berakhirnya jenjang sekolah *primary* Belanda tampak dari murid yang berhasil menyelesaikan pendidikan Belanda dengan terhormat dan menerima penghargaan berupa ijazah sebagai tanda tamatan belajar jenjang taraf dasar. Sekaligus tanda bukti ijazah menjadi salah satu sejarah awal perempuan untuk dapat melanjutkan ke jenjang bangku sekolah yang lebih tinggi.

Tahun 1920, pendidikan *primary* Belanda memperlihatkan eksistensinya dalam memajukan generasi wanita pribumi Jawa yang terdidik. Kebanggaan memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mendirikan *Kartinschool* menjadi sebuah acuan tolak ukur perkembangan ranah edukasi yang membuka modernitas barat untuk dapat berakulturasi dengan budaya penduduk asli. Mempertahankan komitmen dan kepercayaan wali murid tidak semata-mata melihat dari segi mengangkat derajat anak perempuannya tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu hingga dapat berguna di lingkungan keluarga dan masyarakat.

- **Penutupan Alokasi Dana Sumbangan *Kartinschool* Tahun 1920**

Pada tahun 1919, sekolah Kartini Semarang beregenerasi menjadi sekolah wanita paling populer di Hindia-Belanda. Sekolah ini telah mencetak lulusan yang mendapat pengakuan profesionalitas untuk meneruskan strata pendidikan menengah. Selain itu, para lulusan sekolah ini juga memperoleh izin bersekolah di sekolah Van Deventer Semarang. Sekolah ini menunjukkan peningkatan keuangan dari biaya tunjangan sekolah per-bulan dengan menyisihkan sebagian pemasukannya yang berfungsi untuk membangun sekolah atas nama Van Deventer. Pasalnya, Van Deventer layak memperoleh anugerah penghargaan dan jasa karena telah berusaha mewujudkan impian Kartini tentang pendirian sekolah bagi kaum perempuan pribumi.

Ketika meninggalnya pelopor bapak politik etis tersebut, nasib donasi sekolah Kartini telah lepas tangan dari donator Belanda. Tetapi pemasukkan *kas* pembendahan sekolah tetap jalan seperti sediakala karena adanya uluran tangan yang membantu perkembangan sekolah demi pemuda pribumi. Sehingga, tidak semata-mata melepaskan tanggung jawab dengan membiarkan mengelola keuangan awal dengan tangan kosong. Masih adanya iktikad baik untuk menghidupkan sekolah ini melalui ceremonial penutupan atas 797 kontributor dari direksi asosiasi *Kartinifounds*. Namun, proses penutupan kerja sama antara para donator Belanda perlu melalui serangkaian tahapan yang tepat.

Pengadaan sekolah Van Deventer khusus bagi para murid lulusan *Kartinschool* merupakan sekolah keguruan pertama yang menempatkan peluang profesi sebagai guru dari kalangan kaum pribumi untuk dapat meneruskan jasa para pendidik di sekolah-sekolah lainnya. Dengan menempuh studi empat tahun di sekolah tersebut, para murid mendapatkan ijazah yang

menegaskan kualitas profesional di bidang keahliannya. Hasil upaya tentang progres pemerataan pendidikan menjawab kegelisahan kaum perempuan pribumi Jawa bahwa perempuan patut memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan dalam ranah publik untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Maka timbul berbagai aksi-aksi pemberontakan yang ingin menumpas ketidakadilan pemerintah Belanda kepada masyarakat Jawa.

Pada tahun 1920, kaum wanita pribumi mengalami perkembangan popularitas dengan mengusung tema gerakan-gerakan organisasi kaum perempuan pribumi. Lintas gerak kaum perempuan yang mulai berani menunjukkan kredibilitas dalam ranah politik. Sebanyak 30 wanita membentuk suatu organisasi dalam kongres kedua tentang wanita Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22-26 Desember 1928. Acara ini termasuk kesempatan kedua yang menampilkan perkumpulan federasi kaum wanita, yaitu; Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) atau *Indonesian Women's Union*. Walaupun organisasi ini tidak mengantarkan secara jelas politiknya terhadap isu-isu yang mendorong nasionalisme sampai masa kepemimpinan Soekarno bahkan menyesal akan hasil kongres tersebut.

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Dalam penulisan ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan skripsi dengan judul "*Kartinschool ; Pendidikan Kaum Perempuan Pribumi Jawa di Semarang Tahun 1911-1920*". Kesimpulan ini merupakan jawaban atas problematika peristiwa masyarakat di Hindia-Belanda khususnya kaum pribumi Jawa. Berdasarkan Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pengarah kebijakan yang bersifat penindasan akan berdampak pada kemunculan para tokoh-tokoh untuk mengulurkan tangan sebagai rasa empati terhadap kondisi keterpurukan kaum wanita Jawa. Sehingga harapan dari penulisan ini mampu menjadi sebuah cerminan akan keberadaan suatu bangsa. Sekaligus terdapat saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi bagi pembaca terkait studi permasalahan perempuan.

Pada penulisan ini peneliti dapat menyimpulkan atas judul "*kartinschool: Pendidikan Kaum pribumi Jawa di Semarang Tahun 1911-1912*", yaitu; *Pertama*, sekolah ini merupakan permintaan dari seorang wanita Jawa keturunan darah biru untuk memperbaiki nasib kaum perempuan pribumi Jawa kepada kaum humanisme Belanda dengan mengatasnamakan perempuan bernama Kartini. Konsep pendidikan yang dicanangkan oleh kaum Humanisme Belanda melebihi ekspektasi Kartini. Baik dari segi kualitas pendidikan seperti halnya sarana dan prasarana sekolah hingga kuantitas pembelajaran berkelas eropa.

Memang sekolah ini sangat relevan bagi kaum wanita yang menginginkan perbaikan kedudukan wanita yang masih termaginalkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Ketika masyarakat telah mampu mengakui

bahwa kaum wanita mempunyai peran yang signifikan dalam tatanan rumah tangga maka kebutuhan akan pendidikan sangat penting untuk menjaga dan mengayomi sebuah keluarga yang harmonis. Padahal awalnya para orang tua masih khawatir apabila anak perempuannya berpendidikan sejajar dengan laki-laki bahkan duduk sebangku dengan anak laki-laki menjadi sesuatu yang tabu. Tetapi setelah mengerti akan maksud kondisi dan keinginan kaum wanita pribumi, para wali murid mulai mengizinkan anak perempuannya memperoleh pendidikan yang mendepankan moral dan etika.

Kedua, penyajian mata pelajaran *Kartinischool* yang tersistematis memberikan suasana baru bagi kaum pribumi. Peralpnya, pengetahuan bukan hanya sekedar menulis dan membaca tetapi memperkenalkan dan menanamkan jiwa kebudayaan barat. Pengetahuan yang wanita peroleh dari sekolah ini adalah Ilmu pengetahuan eksakta, ilmu bahasa, ilmu sejarah, dan keterampilan pembuatan kerajinan tangan yang semuanya merupakan mata pelajaran untuk mengasah pola pikir logika pada anak usia sekolah.

Hal ini tidak adanya kesalahan justru menjadikan kepribadian yang lebih mencintai tanah Jawa. Menurut tulisan surat Kartini yang pernah mengirimkan kepada Nyonya Abandanon menjelaskan bahwa silahkan seorang murid pribumi Jawa belajar berbagai ilmu pengetahuan hingga ke negeri Belanda tetapi sekiranya pendidikan kaum perempuan seharusnya memiliki karakter membangun sopan santun dan keasusilaan dengan mengkombinasikan antara pendidikan barat dan timur dengan melalui dukungan lingkungan keluarga dan sekolah yang dapat menunjang integritas kaum perempuan pribumi Jawa. Sehingga bukan mengarahkan kepada anak yang berkepribadian ke barat-baratan serta menyikapi budaya itu sebagai kekayaan akan keunikan atas jati diri bangsa

Ketiga, pada ulasan sebelumnya telah menerangkan bahwa para murid *Kartinischool* memperoleh pengajaran dari para tenaga kerja pendidik Belanda yang diterjunkan langsung ke Hindia-Belanda. Terkait hal itu, para guru-guru Belanda mempunyai latarbelakang seseorang yang belum pernah sama sekali menyentuh model pengajaran berbasis pengabdian kemasyarakatan. Di mana tenaga pengajar Belanda yang terbiasa berhadapan dengan anak-anak Eropa, secara langsung mendapatkan perintah dari Van Deventer untuk mengajarkan anak-anak pribumi di kelas tersebut. Tentu para tenaga pengajar merasa tegang dan sulit karena mengingat tidak ada yang mampu berbahasa Jawa. Selain itu, pengalaman mengajar begitu asing menambah daftar alasan para guru Belanda merasa aneh karena memberikan ilmu di negeri terjajah oleh bangsanya sendiri. Sehingga penerapan berbahasa Belanda menjadi solusi atas permasalahan ini.

Keempat, pendidikan kaum perempuan di kalangan pribumi Jawa menghasilkan sebuah perubahan budaya masyarakat yang bukan hanya sekedar bersekolah tetapi juga munculnya sifat emansipasi sebagai salah satu kemajuan wanita. Emansipasi merupakan suatu aktifitas

yang mengarahkan tentang kebebasan dari terbelenggunya hak-hak kaum wanita. Melalui pendidikan ini, kaum wanita dapat mengaktualisasikan kepribadian dengan mendemonstrasikan berbagai keterampilan kerumah tangga, seperti; menjahit dan memasak pada mata pelajaran pekerjaan keterampilan dan pelatihan bebas terencana. Kemudian, pengetahuan akan bahasa Belanda sebagai indikasi syarat kelulusan sekolah Kartini.

Hal ini mengungkapkan bahwa menurut pandangan barat apabila seorang murid belum sanggup menyamakan tutur bahasanya maka dianggap masih terbelakang. Sehingga adanya asumsi bahwa seorang anak perempuan yang menempuh pendidikan dapat menunda pernikahannya. Sehingga, asumsi-asumsi ini mengakibatkan kaum perempuan terdorong untuk kali pertama berkecimpung dalam dunia politik dengan mendirikan sebuah organisasi-organisasi wanita yang misi ini mengarah pada penyetaraan gender dan menghapus diskriminasi sosial di tahun 1920an. Walaupun demikian, ternyata organisasi wanita ini menyimpang dari rasa nasionalisme hingga masa pemerintahan Soekarno. Organisasi wanita ini mendorong untuk menyetarakan akan kedudukan kaum wanita di dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Sehingga mengenai paham-paham keagamaan dan adat sangat kurang akibatnya kaum wanita sulit untuk bertindak ke arah yang lebih maju.

Kelima, Pemahaman tentang perempuan yang bergerak dalam bidang politik, menuai gambaran kaum pendidik telah mengalami kekuasaan intelektual *transformatif* dan *transmitif*. Pendidikan *transformatif* mengupayakan *enkulturasi* dan *reproduksi kultural* sehingga tetap melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang masih utuh. Kemudian menyikapi pendidikan bersifat intelektual *transmitif* menyadarkan atas penindasan dan ketimpangan secara *asimetris* antar kelompok untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi yang partisipatoris.

• **Saran**

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk tetapkan para kaum wanita berkarya, mengaktualisasikan kepribadiannya ke dunia publik. Akan tetapi, kewajiban sebagai kodrat perempuan untuk mengurus kerumahtanggaan dianggap suatu hal yang menyakitkan atau tindakan yang sewenang-wenang adalah salah. Justru ini merupakan cermin agama bahwasanya seorang istri hendaklah mencintai suami dan keluarga.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia untuk mengeksplorasi segala kreatifitas, gagasan atau ide-ide baru untuk perkembangan kepribadian yang lebih matang. Menuntut ilmu sebagai upaya manusia menyelaraskan antara ketaqwaan dan keimanan. Apabila ilmu itu masih bersifat normatif dan tidak ada makna pada setiap pembelajaran yang diperoleh maka sia-sialah apa

yang telah mereka peroleh. Hal ini tampak jelas saat adanya perubahan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh kaum pemerintah belanda dengan dalih bagi kepentingan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

• Sumber Arsip

Arsip Nasional Djakarta. surat permohonan Kartini kepada gubernur jendral Hindia-Belanda. Jepara: 19 april 1904.

De Sumatra Post. 17 September 1913.

Inventaris Uit de Beschikking Van den Directur der Burgerlijke Openbare.

Inventaris Kepala Departemen A, No. A 32/18/16. 29 September 1930.

Werken Van den. 14 September 1923.

Rapport van den stand der werkzaamheden aan den bouw van de Kartinischool over de maand. Oktober 1914.

Algemeen Handelsblad. 26 November 1932.

Bataviaasch nieuwsblaad. 22 Oktober 1925.

De Indisch Courant. 16 Desember 1925.

Het Nieuws Van den dag; Kleine Courant. 28 Juni 1913.

Pikiran Rakyat. 21 April 2006

Uit den Archipel Telegrammen. 17 September 1913.

Surat Kepada Gubernur Jendral Hindia-Belanda. Jepara: 28 Agustus 1903.

surat permohonan Kartini kepada gubernur jendral Hindia-Belanda. Jepara: 19 april 1904.

• Sumber Buku

A,Daliman. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX Sistem politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. (Yogyakarta: Ombak).

Adrian Vickers. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Insan Madani).

Armijn Pane. 2008. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Jakarta; Balai Pustaka).

Alwi As. 1981. *Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat yang keliru Tentang Islam*. (Bandung: CV Diponegoro).

Artides,Katoppo.dkk. 1990. *..Satu Abad Kartini 1879-1979*. (Jakarta: Sinar Harapan).

Anne Both. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: LP3ES).

Anom Whani Wicaksana. 2018. *Raden Ajeng Kartini*. (Yogyakarta: C-Klik Media).

Bambang Eryudhawan. 2015. *100 Tahun Bangunan SD Kartini Semarang 1915-2015*, (Jakarta: Yayasan Arsari Djojohadikusumo).

Baay R. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia-Belanda Tahun 1870-1928*. (Depok: Komunitas Bambu,).

C, Fasseur. 1975. *Kulturstelsel En Koloniale Baten : De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. (Leiden: Universitaire Pers Leiden).

Clifford Geertz.1983. *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*. (Yogyakarta: Pustaka Jaya,).

Cora Vreede-De Stuers. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian*. (Jakarta; Komunitas Bambu,).

D.J.M. Kleymans. 1897. *Het Trojaanse Paard : Voorgeschiedenis Der Gementelijke En Gewestelijke Raden In Nederlands-Indie*. (Utrecht; Het Economisch Beleid Creutzberg).

Elsbeth, Locher-Scholten. Etika Yang Berkeping-Keping (Lima Telaah Kajian Aliran Etis Dalam Politik Kolonial 1877-1942. (Jakarta; Djambatan, 1996).

Elsbeth Locher-Scholten. 2000. *Women And Te Colonial State: Essay On Gender And Modernity in The Netherlands Indie 1900-1942*. (Amsterdam; Amsterdam University Press).

F.D.Holleman. 1971. *Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan Perkembangan di Hindia-Belanda*. (Jakarta:Bharatara Jakarta).

G.H. Von Faber. 1930. *A Short History Of Journalism in the Dutch East-Indies*. (Batavia; G.Kollf & co).

Geuze&Co. 1915. *Neerlandia Jaargang 19*. (Dordrecht; dbnl).

Imran Manan. 1989. *Antopologi Pendidikan; Suatu Pengantar*. (Jakarta; P2LPTK).

Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Ahmad. 2013. *Istri-Istri Raja di Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Arasaka,).

L. De Vries te Batavia-Centrum dkk. 1938. *Jubileum-Verslag Uit gegeven Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan Der Kartinfonds*. (s'Gravenhage:Imhaffstraata 30).

Levi,Sheely. 1899. *History Of Education: Sejarah Pendidikan*. Cetakan Ke-IV. (Chicago: American Book Company).

Mochtar,Lubis. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Maria Ulfa Subadio. 1994. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. (Yogyakarta: Anggota IKAPI).

Mochamad Nursalim.dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. (Surabaya; Unesa University Press).

N.N. 1944. *A Manual Of Netherlands India; Dutch East Indies*. (London; His Majesty's Stationery Office).

Penders, Chr, L.M. 1977. *Indonesia, Selected Documents On Colonialism and Nationalism 1830-1942*. (Queensland : University Of Queensland Press).

Robert Fruin. 1905. *Nederland's Rechten en Verplichtingen Ten Opzichte Van Indie: Verspreide Geschriften, jilid. 10*. (s-Gravenhage; Ons Program).

Retnaningtyas Dwi Hapsari. tt. *Sekolah Kartini dan Van Deventer : Pelopor Sekolah Perempuan di*

Semarang Pada Masa Kolonial. (Semarang; Universitas Diponegoro).

S. Nasution. 2015. *Sejarah Pendidikan Indonesia.* (Jakarta: Bumi Aksara).

Sumarsono Mestoko. 1983. *Education In Indonesia: Throughout The Centuries.* (Jakarta: Ministry Of Education And Culture).

Tim Nasional Indonesia. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan*

Taruna dan Tukiman. 1987. *Ciri Budaya Manusia Jawa.* (Yogyakarta: Kanisius).

- **Sumber Jurnal**

Nur Urifatulailiyah. 2017. *Pemikiran Pendidikan Perempuan Pribumi Jawa Pers Kolonial Tahun 1908-1928.* Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 5.

Muamaroh. 2013. *Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan.* Educational Psychology Journal. Vol. 2 (1).

Syahrul Amar. 2017. *Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX.* Jurnal Fajar Historia. Vol. 1 (2).

Yerry Wirawan. 2018. *Independent Women in Postcolonial Indonesia: Rereading The Works Of Rukiah,* Southeast Asian Studies. Kyoto University. Vol. 7 (1). pp.85-101.

- **Sumber Penyajian Makalah Dalam Seminar**

Carolyn Medel dan Bettina Bochynek. 1995. *Women, Education, Empowerment: Pathways Toward Autonomy.* Makalah disajikan dalam The International Seminar On Women's Education and Empowerment. (UNESCO Institute For Education); UIE-Hamburg, 27 Januari - 2 Februari 1993.

- **Sumber Internet**

Hendri F. Isnaini, Habis Gelap Terbitlah sekolah, diakses melalui laman internet di tanggal 23-04-2013.

<http://historia.id/modern/habis-gelap-terbitlah-sekolah>

